

**HUBUNGAN NU DAN MASYUMI (1945-1960)  
Konflik Dan Keluarnya NU Dari Masyumi**

**MOH AMIRUL MUKMININ**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
e-Mail: [mohamirulm@gmail.com](mailto:mohamirulm@gmail.com)

**Sumarno**

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Hubungan NU dan Masyumi tahun 1945-1960 memang sangat menarik untuk dikaji. Seperti Skripsi yang ditulis oleh Noor Ishaq tentang *Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia*, dan Tesis yang ditulis oleh Ichwan Arifin tentang *Kiai dan Politik*. Dari situ kemudian peneliti membuat penelitian yang berbeda dengan penelitian diatas yang lebih memfokuskan pada konflik dan keluarnya NU dari Masyumi.

Adapun sumber utama yang didapat adalah dokumen sezaman tentang putusan hasil Mukhtamar NU ke-19 pada 8 Mei 1952 di Palembang tentang keluarnya NU dari Masyumi, dan dokumen teks hasil perundingan NU dan Masyumi pada 22-23 Mei 1952 di Jakarta.

Beberapa rumusan masalah antara lain: bagaimana struktur kelembagaan NU dalam Masyumi, mengapa NU keluar dari Masyumi tahun 1952, dan bagaimana peran NU setelah keluar dari Masyumi hingga tahun 1960.

Berdasarkan hasil analisis data bahwa Diawal pembentukannya, Masyumi menerapkan dua macam keanggotaan yaitu perseorangan dan organisasi. NU menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi dan Kedudukan Majelis Syuro (pimpinan tertinggi) yang mempunyai wewenang menentukan kebijakan partai dipegang oleh tokoh NU yaitu KH. Hasyim Asy'ari sehingga NU cukup puas walaupun pimpinan partai didominasi oleh kelompok intelektual. Seiring berjalannya waktu sistem keanggotaan Masyumi ternyata sangat lemah, hal itu terbukti dengan ketidak tegasan pimpinan Masyumi menghadapi sebuah masalah baik internal maupun eksternal karena perbedaan kubu didalam partai. Sehingga satu persatu anggota yang kurang terakomodir seperti SI yang memilih keluar karena mempunyai pemikiran berbeda yang menurut mereka benar.

Usaha untuk memencilkan para ulama di dalam percaturan politik terus di galakan oleh kelompok intelektual Masyumi bahkan mereka merubah wewenang Majelis Syuro yang awalnya bertugas menentukan kebijakan akhirnya hanya sebagai penasehat semata sehingga hal itu yang membuat NU memisahkan diri dari Masyumi lewat Mukhtamar NU ke-19 di Palembang dan menjelma menjadi sebuah partai politik sendiri dengan nama Partai NU yang berkiprah dalam Pemilu pertama tahun 1955. Berdasarkan hasil Pemilu tahun 1955, NU menempati 4 partai besar sehingga banyak tokoh-tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Setelah pemilu tahun 1955 ada 5 pemikiran yang memancar dari dua arus yaitu arus pengaruh Barat dan tradisi Hindu-Jawa, Islam); PNI dan NU sama-sama disentuh besarnya pengaruh oleh tradisionalisme Jawa, tetapi pengaruh alam pemikiran Barat sangat kuat pada PKI dan Masyumi. Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun dua saingan NU yang dipengaruhi dengan kuat oleh alam pemikiran Barat tersingkir dari panggung politik. Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena keterlibatan beberapa tokohnya dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia).

**Kata Kunci : Konflik, Nahdlatul Ulama, Masyumi**

**PENDAHULUAN**

Dua bulan setelah Proklamasi 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat No.X yang berisi anjuran tentang berdirinya partai-partai politik. Maklumat Pemerintah ini tidak disia-siakan oleh Ummat Islam. Melalui sebuah Kongres Ummat Islam pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta dibentuklah sebuah partai Islam dengan nama Masyumi. Adapun Masyumi yang berdiri setelah kemerdekaan ini berbeda dengan zaman Jepang. Karena didirikan oleh Ummat Islam sendiri.

Masyumi menerapkan dua macam keanggotaan; perseorangan dan organisasi dengan pertimbangan untuk memperbanyak anggota. Sistem ini ternyata menyimpan kelemahan, karena sejak terbentuknya selalu menjadi topik pembahasan dalam setiap kongres partai.<sup>1</sup>

Akhirnya perbedaan pendapat muncul ketika masa Kabinet Hatta terkait dengan perjanjian Renville. Para tokoh pembaharu melihat bahwa masuk kedalam Kabinet Hatta hukumnya haram, karena itu harus ditolak.

<sup>1</sup> H.A Chalid Mawardi. *Practica Politica NU Mendajung di Tengah Gelombang*. Surabaya : Museum NU

Sedangkan NU yang disuarakan oleh KH. Wahab Hasbullah melihat justru karena melenyapkan munkarot itu harus masuk kedalam. Terjadinya perbedaan pendapat antar anggota menyebabkan kondisi Masyumi sangat melemah dan alokasi kekuasaan diluar Masyumi pun sangat terbatas pada kursi Menteri Agama. KH Wahid Hasyim dan KH Maskur selalu mewakili NU untuk posisi tersebut. Selama berlangsungnya proses pembentukan kabinet baru pengganti kabinet Sukiman itu NU menyampaikan keinginannya agar kursi kementerian agama diberikan kembali kepada KH Wahid Hasyim. Tuntutan NU yang disampaikan oleh KH. A. Wahab Hasbullah itu diungkapkan dalam suatu wawancara pers. Tuntutan itu sudah tentu tidak bisa dipenuhi oleh pimpinan Masyumi sebab kelaziman memberikan kursi kementerian Agama kepada NU bukan komitmen politik yang harus dipatuhi. Di sisi lain Muhammadiyah juga menghendaki jabatan itu dengan alasan NU sudah memimpin kementerian Agama selama tiga kali kabinet. Akhirnya Masyumi memberikan jabatan kementerian agama kepada KH Fakhri Usman dari Muhammadiyah pada kabinet yang baru yaitu kabinet Wilopo.<sup>2</sup>

Semua kekecewaan yang telah menumpuk itu mendorong NU dalam Mukhtar ke 19 di Palembang pada tahun 1952 memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri menjadi partai politik.

Setelah pemilu tahun 1955 ada 5 pemikiran yang memancar dari dua arus yaitu arus pengaruh Barat dan tradisi Hindu-Jawa, Islam); PNI dan NU sama-sama disentuh besarnya pengaruh oleh tradisionalisme Jawa, tetapi pengaruh alam pemikiran Barat sangat kuat pada PKI dan Masyumi. Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun dua saingan NU yang dipengaruhi dengan kuat oleh alam pemikiran Barat tersingkir dari panggung politik. Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena keterlibatan beberapa tokohnya dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia).

Hubungan NU dan Masyumi tahun 1945-1960 memang sangat menarik untuk dikaji. Seperti Skripsi yang ditulis oleh Noor Ishaq tentang *Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia*, dan Tesis yang ditulis oleh Ichwan Arifin tentang *Kiai dan Politik*. Dari situ kemudian peneliti membuat penelitian yang berbeda dengan penelitian diatas yang lebih memfokuskan pada konflik dan keluarnya NU dari Masyumi.

### Kajian Pustaka

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya :

Penelitian tentang Masyumi yang pernah dilakukan oleh Noor Ishaq yang berjudul "Pergerakan Masyumi di Indonesia (1945-1960)". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dilihat dari sejarah kebangkitan partai Masyumi di Indonesia tidak bisa terlepas dari kemunculan ruang politik (public asphere). Ruang publik dipandang penting karena merupakan lokasi tempat wacana-wacana yang

diekspresikan dan merupakan ruang tempat kegiatan-kegiatan intelektual politik.

Dalam konteks Masyumi, nasionalisme adalah komunitas epistemik dan pergerakan islam yang berperan penting dalam meluaskan ruang publik keluar dari lingkaran priyayi. Dengan demikian pergerakan nasionalisme keluar dari kesempitan elitisme menuju keluasan khalayak ramai. Hal ini adalah memberi fondasi yang kuat bagi gerakan kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia.<sup>3</sup>

Penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Ichwan Arifin yang berjudul "Kiai dan Politik": Studi kasus perilaku politik kiai" Penelitian ini dijelaskan bahwa NU telah mengeluarkan pedoman yang disebut sebagai Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU, yaitu: (1) keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (2) politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah- langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yakni terwujudnya masyarakat adil makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat. (3) pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. (4) dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (5) haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani, moral agama, konstitusional sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. (6) dilakukan untuk memperkokoh konsensus- konsensus nasional dan dilaksanakan dengan *akhlaqul karimah* sebagai pengamalan ajaran Islam *Ahlussunah wal jama'ah*. (7) dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama memecah belah persatuan. (8) Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu'dan saling menghargai satu sama lain sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU. (9) menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ishaq, Noor. 2009. *Pergerakan partai masyumi di indonesia (1945-1960)*. skripsi jurusan pemikiran politik islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>4</sup> Arifin, Ichwan. 2008. *Kiai dan politik*. Tesis prodi Magister Ilmu Politik Undip Semarang

<sup>2</sup> MH Rofiq . 2003. *NU dan Ambisi Kekuasaan*. Surabaya : Musium NU

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wasul Nuri yang berjudul “Perseteruan Partai Masyumi dengan PKI”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada saat Masyumi didirikan oleh ummat Islam pada tahun 1945, NU turut menjadi pendukung utama partai. Pada perkembangan selanjutnya NU menarik dukungannya itu pada tahun 1952. Dengan kata lain NU mengubah dirinya dari jam’iyah (gerakan sosio-keagamaan) menjadi partai politik yang berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Keluarnya NU dari Masyumi menandakan satu babak baru. *Pertama*, mulai saat itu NU tampil menjadi satu kekuatan politik baru dengan dukungan masa yang besar. *Kedua*, bagi partai Masyumi kehadiran partai NU merupakan awal persaingan dengan kalangan sendiri. *Ketiga*, dipandang dari sisi kekuatan maka Masyumi telah mengalami kegoncangan yang demikian besar, pendukung utama tinggalah Muhammadiyah.<sup>6</sup>

Selain itu peneliti juga menemukan jurnal UNY “I VOL.1 2012 Sejarah Indonesia” oleh Ghufron Fauzi tentang Peran politik NU pada PEMILU 1955 di Indonesia. Isi pokoknya bahwa NU sebagai jam’iyah diniyah memasuki fase kedua perkembangan organisasi yang cenderung kearah politik. Perbedaan pandangan terjadi antara kaum modern dan tradisional yang semakin lama mengarah ke arah perpecahan.

Keteguhan prinsip aswaja NU memaksa NU membuat keputusan berpisah dengan Masyumi. NU harus melalui Mukhtar untuk meneguhkan hati berpisah dengan Masyumi tahun 1952. Hal ini karena NU tidak ingin memecah belah ummat.<sup>7</sup>

### Metode Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah,<sup>8</sup> yakni meliputi pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber, penafsiran (Interpretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi)<sup>9</sup>. Keempat langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

#### Heuristik (Pengumpulan Data)

Pada awal tahap ini, penulis berusaha mencari sumber baik sumber primer dan sekunder yang diperoleh dari museum NU Jawa Timur dan perpustakaan Peneliti juga menambahkan data hasil wawancara dengan para tokoh dan aktifis baik NU maupun Masyumi sebagai pelengkap keakuratan data.

<sup>5</sup> Nuri, Wasul. 2008. *Perseteruan Partai Masyumi dengan PKI (1945-1960)*. Skripsi jurusan sejarah dan kebudayaan islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>6</sup> Mahrus Irsham . 2009. *Ulama dan Partai politik upaya mengatasi krisis* . Surabaya : Museum NU

<sup>7</sup> Jurnal UNY “I VOL.1 2012 Sejarah Indonesia” oleh Ghufron Fauzi tentang Peran politik NU pada Pemilu 1955 di Indonesia

<sup>8</sup> Louis Gottschalk, *mengerti sejarah*, trj Nugroho Notosusanto. (Jakarta : UI Press, 1986) Hlm 32

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *pengantar ilmu sejarah*, halaman 84. Lihat dudung abdurrahman, *pendekatan sejarah (pelatihan penelitian agama, Yogyakarta: PUSLIT UIN SUKA, 2004) hlm. 11*

adapun sumber utama diperoleh antara lain dokumen teks putusan hasil Mukhtar NU ke 19 tentang keluarnya NU dari Masyumi pada tanggal 8 Mei 1952 di Palembang , dan dokumen teks hasil perundingan NU dan Masyumi pada tanggal 21-22 Mei 1952 di Jakarta serta buku-buku yang ada kaitannya dengan hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan keluarnya NU dari Masyumi seperti buku berjudul *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* karangan Khoirul Anam, buku berjudul *Partai Masjumi antara godaan demokrasi dan islam integral* karangan Remy Madinier, buku berjudul *Ulama dan Partai politik upaya mengatasi krisis* karangan Mahrus Irsham, buku berjudul *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967* karangan Greg Fealy dan masih banyak lagi yang lainnya.

### Kritik Sumber

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah pengujian secara kritis terhadap data yang diperoleh. Data yang digunakan oleh peneliti salah satunya adalah dokumen-dokumen kuno, kemudian sebagian besar juga memperoleh berbagai hasil penelitian serta karya-karya peneliti terdahulu, oleh karena itu pada tahap ini peneliti cenderung menggunakan kritik intern sebagai tumpuhan.

Kritik intern dilakukan untuk meneliti kebenaran data (kesahian sumber) yang diperoleh. Melalui kritik intern itu diharapkan peneliti mendapatkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Cara yang ditempuh peneliti dengan membandingkan data-data yang berasal dari satu sumber dengan sumber lain untuk membuktikan kebenaran data yang diperlukan sehingga relevan dengan objek penelitian. Dengan langkah ini diharapkan oleh peneliti ditemukan informasi yang lebih kuat dalam penulisan ini. Data yang telah di kritisi dianggap sebagai fakta yang diakui kesahiannya.

### Interpretasi Sumber

Penulis akan mencari keterhubungan antara fakta baik dari sumber primer dan sekunder yang telah diperoleh. Penulis akan mencocokkan antara fakta dari dokumen sezaman dengan buku-buku maupun artikel yang membahas tentang hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan keluarnya NU dari Masyumi

### Historiografi

Setelah melalui tiga tahapan terdahulu, selanjutnya peneliti menyajikan hasil pengolahan data yang dikumpulkan dengan sebuah tulisan ilmiah. Penulis berusaha menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian yang berarti dan disajikan dalam sistematika dibawah ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakupi empat hal, yaitu (1) *Struktur kelembagaan NU dalam Masyumi* (2) *NU keluar dari Masyumi tahun 1952* (3) *Peran NU setelah*

Pemilu 1955 hingga tahun 1960. Adapun pembahasan hasil penelitian sebagai berikut ini:

### Struktur Kelembagaan NU Dalam Masyumi

NU menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi, sebagai pimpinan tertingginya (Majlis Syuro) dipegang oleh tokoh ulama NU; KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim sebagai salah seorang wakil ketua Majelis Syuro, kedudukan Majelis Syuro ditegaskan memiliki peranan menentukan dalam kehidupan partai sehingga NU cukup puas dengan kedudukannya walaupun pimpinan partai didominasi oleh kelompok pembaharu yang biasanya intelektual<sup>10</sup>

Setelah perang kemerdekaan berakhir, maka revolusi Indonesia beralih ke periode mempertahankan kelangsungan hidup Republik.

Dalam Masyumi, kritik-kritik para pemimpin NU terhadap garis politik yang ditempuh oleh pemimpin-pemimpin Masyumi menimbulkan suatu reaksi yang kurang diperhitungkan masak-masak oleh pemimpin Masyumi yaitu suatu usaha untuk memencilkan peranan para ulama di dalam percaturan politik.

Didalam dewan pimpinan pusat Masyumi terjadi suatu aliran pikiran yang kuat sekali untuk menyingkirkan peranan ulama dalam percaturan politik ini terutama dari kalangan kaum intelektual yang berpendidikan barat<sup>11</sup>.

Menurut jalan pikiran mereka memperkejakan para ulama dan kiai didalam tugas politik adalah suatu hal yang tidak pada tempatnya. Tugas para ulama dan kiai adalah di surau-surau dan Masjid serta pondok pesantren bukan dalam lembaga-lembaga politik.

Demikian pula menurut jalan pikiran mereka ini. Kementerian agama adalah suatu kedudukan yang 100% bersifat politik. Yang seharusnya menjabat Menteri agama adalah orang-orang intelektual bukan seorang ulama atau kiai. Bahkan menurut logika ini Menteri agama dapat juga dipegang oleh orang-orang yang tidak beragama Islam asalkan menjamin terpeliharanya kebebasan beragama.

Maka dalam rangka memperkuat kedudukan kaum intelektual dan mendesak kedudukan ulama dan kiai didalam pimpinan dewan partai Masyumi ini. Akhirnya dalam salah satu Kongres Masyumi diputuskan untuk memberi nama Masyumi dengan "Partai Politik Islam Masyumi" tidak lagi berarti suatu singkatan dari "Majlis Syuro Muslimin Indonesia".

Oleh pemimpin NU jalan pikiran yang demikian dianggap menyesatkan dan mengandung maksud jahat terhadap para ulama atau kiai. Jalan pikiran para intelektual Masyumi ini sangat merugikan kedudukan NU yang merupakan himpunan para ulama.

Maka dapat dimengerti kalau jalan pikiran kaum intelektual ini merupakan isu yang mengancam keutuhan Masyumi. Sebab para ulama atau kiai tidak mungkin menerima adanya suatu usaha yang hendak mendesak

keluar peranan mereka dari gelanggang percaturan politik.

Demikian maka isu mengenai peranan ulama atau kiai didalam percaturan politik ini merupakan bom waktu yang kemudian meledak dan memisahkan NU dari Masyumi.

Pada saat itu para tokoh intelektual Masyumi menunjukkan sikap-sikap politiknya yang menurut pandangan ulama NU tidak tepat. Pada waktu kabinet Sukiman berkuasa, menteri luar negeri Ahmad Subardjo dari Masyumi menandatangani persetujuan MSA (Mutual Security Act) atau keamanan bersama dengan pihak Amerika Serikat.

Pada waktu itu SEATO belum terbentuk. Namun dasar-dasarnya telah dirintis oleh Amerika Serikat dengan mengadakan persetujuan-persetujuan Bilateral dengan berbagai negara di Asia Tenggara, seperti MSA itu.<sup>12</sup>

NU tidak menyetujui politik luar negeri Masyumi dibawah pimpinan Sukiman-Subardjo ini. Sebab dengan penandatanganan MSA ini maka politik luar negeri Indonesia sudah jelas memihak blok barat dan tidak lagi berdiri diatas prinsip-prinsip bebas dan aktif.

Dengan demikian maka ketidakpuasan NU terhadap Masyumi bertambah dengan satu alasan yang prinsipal yaitu politik luar negeri yang ditempuh oleh Masyumi.

Disamping itu ada satu hal lagi yang cukup menjengkelkan NU terhadap Masyumi yaitu didalam politik pemulihan keamanan dalam negeri.

Pada waktu kabinet Natsir berkuasa maka Perdana Menteri Moh Natsir mengeluarkan suatu seruan kepada gerombolan DI/TII Kartosuwiryo agar turun dari gunung dan keluar dari hutan untuk kemudian kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Keamanan mereka akan dijamin dan akan diberi amnesti. Akan tetapi setelah gerombolan DI/TII turun dan memasuki kota, mereka dilucuti dan kemudian dijebloskan dalam penjara. Gerombolan DI/TII yang taat pada seruan Pemerintah ini dipimpin oleh Amir Fattah.<sup>13</sup>

Dengan kejadian ini maka gerombolan DI/TII tidak mempercayai lagi setiap seruan pemerintah untuk turun dari gunung dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Politik Perdana Menteri Natsir ini merupakan salah satu sebab pokok mengapa penyelesaian keamanan di Jawa Barat menjadi berlarut-larut sampai tahun 1961.

Setelah kabinet Natsir jatuh maka berdirilah kabinet Sukiman-Suwiryo. Pada waktu kabinet Sukiman berkuasa di Jawa Tengah terdapat Batalyon-Batalyon TNI dari ex. Hizbullah yang sudah lama memendam rasa dendam terhadap Batalyon lainnya sehingga benih-benih peperangan saudara antara Batalyon TNI di Jawa Tengah semakin matang dari hari kehari.<sup>14</sup>

Pemerintah Sukiman tidak berusaha mencegah pertumpahan darah ini sehingga meletuslah peristiwa

<sup>12</sup> H.A Chalid Mawardi. *Practica Politica NU Mendajung di tengah Gelombang*. Surabaya : Museum NU

<sup>13</sup> Abu syam Haryono 2001. *Pendidikan Nahdlatul Ulama untuk mengenang dan menghayati perjuangan NU*. Surabaya : Cahaya ilmu

<sup>14</sup> Greg Fealy. 2004. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Surabaya: Museum NU

<sup>10</sup> Khoiril anam .1985 . *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya : PT Duta Aksara Mulia

<sup>11</sup> H.A Chalid Mawardi. *Practica Politica NU Mendajung di tengah Gelombang* . Surabaya : Museum NU

yang terkenal dengan nama “Peristiwa Batalyon 426”. Setelah terjadinya peristiwa Batalyon 426 ini, maka tidak sedikit pemuda-pemuda Islam yang menjadi korban fitnah dan ditangkap serta dijebloskan kedalam tahanan.

Politik keamanan Moh. Natsir di Jawa Barat dan politik keagamaan Sukiman di Jawa Tengah sungguh sangat merugikan ummat Islam. Demikianlah maka NU semakin mempunyai alasan yang cukup untuk bertindak terhadap Masyumi. Pertama, NU tidak mungkin dapat menerima usaha-usaha kaum intelektual Masyumi yang berusaha menyingkirkan para Ulama dari percaturan politik. Kedua, NU tidak dapat menerima politik “pro-Barat” nya Masyumi. Ketiga, NU tidak puas terhadap “politik keagamaan” nya Moh. Natsir di Jawa Barat dan Sukiman di Jawa Tengah yang tidak membikin aman itu.

Persuasi-persuasi yang diplomatis sampai kepada Ultimatum yang keras dikeluarkan oleh PBNU, tetapi tidak dapat merubah keadaan yaitu mendesak agar DPP Masyumi mau “banting-stir” dari pendirian politiknya. Maka sejak Kongres ke-19 NU di Palembang. Semua perundingan-perundingan untuk mendamaikan NU dengan Masyumi sudah dianggap tidak berhasil dan harus diakhiri.<sup>15</sup>

### NU Keluar Dari Masyumi Tahun 1952

Dilain pihak banyak yang muncul dugaan keluarnya NU juga karena campur tangan Soekarno. Dugaan ini mempunyai alasan yang kuat sekuat alasan yang melemahkannya. Dugaan ini ditolak berdasarkan sistem politik dimasa itu (demokrasi parlementer) dimana Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia hanya memiliki kekuasaan simbolis bukan kekuasaan yang menentukan. Sehingga muncul pendapat buat apa Soekarno mencampuri urusan intern sesuatu partai politik seperti NU.<sup>16</sup>

Penulis berpendapat tidaklah benar sama sekali kalau dimasa demokrasi parlementer Soekarno tidak memiliki kekuasaan untuk ikut menentukan keputusan politik. Meskipun didalam sistem parlementer presiden Soekarno menurut aturan permainan tidak memiliki wewenang untuk ikut menentukan keputusan politik tetapi dalam batas-batasan tertentu, Soekarno memainkan peranan yang cukup berarti dalam pengambilan keputusan politik.

Mekanisme yang dipergunakan oleh Soekarno berupa hubungan pribadi dengan pemimpin-pemimpin partai politik pada hakekatnya berperan besar dalam pengambilan keputusan politik saat itu. Perubahan sikap Soekarno dalam hubungan pribadinya dengan Natsir misalnya, ternyata ikut menentukan jatuhnya Kabinet Natsir.

Selama ini banyak opini umum menganggap bahwa hubungan Soekarno dan Natsir selalu berada dalam keadaan tegang, kedua-duanya selalu berhadapan sebagai musuh bebuyutan.

Dengan siapa Soekarno menjalin hubungan pribadi kedalam lingkungan pimpinan NU sampai sekarang belum terungkap kejelasan. Kemungkinan besar adalah KH Wahid Hasyim berdasarkan terdapatnya pengalaman bersama antara kedua tokoh itu di dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan antara lain pernah bersama dalam PPKI.

Andaikan setelah kemerdekaan hubungan pribadi antara Soekarno dengan KH Wahid Hasyim tetap terjalin dengan baik, namun sulit untuk membuktikan terdapatnya pengaruh hubungan pribadi tersebut terhadap sikap politik NU untuk keluar dari Masyumi. Pimpinan Masyumi bersaksi bahwa Menjelang keluarnya NU dari Masyumi, ia diminta untuk bergabung kedalam NU dengan kepatian imbalan kursi menteri sosial.<sup>17</sup>

Tawaran itu ditolak dan ia berkesimpulan bahwa dengan adanya imbalan tersebut diperkirakan terdapat peranan Soekarno yang mendorong NU sampai keluar dari Masyumi.

Keterangan tersebut mempunyai kelemahan yang cukup serius. Mungkin benar sebelum NU keluar dari Masyumi terdapat usaha dari pimpinan-pimpinan NU untuk menarik beberapa orang Masyumi masuk ke NU yang segera akan menjadi partai politik. Tetapi imbalan posisi menteri yang ditawarkan dan dikatakan telah dijamin oleh Soekarno cukup meragukan, sebab didalam proses pembentukan kabinet yang akan menggantikan kabinet Sukiman yang sudah menyerahkan mandat itu sangat ditentukan oleh peranan sayap Natsir dari Masyumi dan sayap Wilopo dari PNI.

Baik Natsir maupun Wilopo merupakan pemimpin partai politik yang berani mengambil sikap tegas bila Soekarno ingin terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam Muktamar NU yang ke XIX yang berlangsung di kota Palembang, tanggal 26 April sampai 1 Mei 1952 terjadi suatu perubahan besar dalam gerakan ini. Diantaranya adalah pemisahan diri dari partai Masyumi dan menyatakan berdiri sendiri sebagai partai politik ketika itu yang memimpin ketua muda PBNU yaitu KH. Abdul Wahid Hasyim.<sup>18</sup>

Pemisahan diri dari partai Masyumi juga didahului perdebatan yang cukup sengit sehingga akhirnya ditempuh jalan pemungutan suara. Hasilnya 61 suara setuju, 9 suara menolak pemisahan dan 7 suara blangko (abstain).

Nahdlatul Ulama secara resmi memisahkan diri dari Masyumi setelah bersama-sama dalam persekutuan sebagai anggota federasi partai politik sejak zaman pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia. Semula Nahdlatul Ulama termasuk dalam satu kelompok dengan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi.

NU tetap meminta pengertian dari Masyumi dan mengharapkan agar Masyumi tetap mempertahankan

<sup>15</sup> MH Rofiq . 2003. *NU dan Ambisi Kekuasaan*. Surabaya : Musium NU

<sup>16</sup> A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 123

<sup>17</sup> Abdul Basit Adnan. 2002. *Kemelut di NU*. Jakarta : CV Mayasari

<sup>18</sup> Dokumen teks putusan hasil Muktamar NU Ke-19 pada 8 mei 1952 di Palembang tentang keluarnya NU dari masyumi

dirinya sebagai badan federatif partai politik yang berdasarkan Islam. Maka dalam keputusan Mukhtar ke XIX, disamping pernyataan keluar secara resmi dari Masyumi, Mukhtar tetap menyarankan agar pelaksanaan keputusan itu tidak menimbulkan goncangan dikalangan ummat Islam. Segala sesuatunya harus dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan baik.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut diatas NU menyokong sepenuhnya agar setelah diadakannya pemilihan umum dalam waktu dekat. Selanjutnya meminta kepada pemerintah untuk mengadakan usaha penghematan dalam perbelanjaan negara. Begitu pula dalam hal pendidikan Pancasila terutama sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa.

Program perjuangan politik yang disusun NU adalah "ingin menegakkan syariat Islam secara prinsipial dan konsekwen". Partai NU berusaha mewujudkan suatu negara kesatuan berdasarkan islam yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk agama yang sehat, dan kebebasan mempunyai serta mengembangkan pikiran yang faham yang tidak merugikan.

Haluan perjuangan yang dianut NU adalah perdamaian. Sedang bentuk negara yang diinginkan adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dalam arti musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam dewan-dewan rakyat yang bersusun barat ke bawah, dengan arti disentralisasi dan otonomi.<sup>19</sup>

Lewat Mukhtar ke-XIX di Palembang pada tahun 1952 juga, NU menjadi kekuatan partai politik sendiri, setelah sekian lama bergabung dalam Masyumi. Kekuatan NU yang sebelumnya tidak diperhitungkan ternyata muncul sebagai kekuatan sangat besar. Dalam pemilu pertama 1955, Partai NU menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi.<sup>20</sup>

### Peran NU Setelah Pemilu 1955 Hingga Tahun 1960

Walaupun tidak punya waktu cukup untuk sosialisasi namun dalam pemilu pertama tahun 1955, NU muncul sebagai partai ketiga terbesar, dengan menarik hampir 7 juta atau 18,4 % dari total suara nasional serta mendongkrak perwakilan di parlemen dari 8 orang ketika masih di Masyumi menjadi 45 orang. Kemenangan ini tentu saja melahirkan luapan kegembiraan bagi warga *nahdhiyyin*, karena mereka merasa beratnya harapan dalam pertarungan tersebut, terlebih-lebih panitia pemenangan pemilu NU sendiri punya prediksi hanya akan memperoleh 20 – 25 kursi. Demikian juga halnya dengan susunan kabinet berdasarkan hasil PEMILU 1955, NU mampu mendudukkan 5 orangnya dalam kabinet, sama dengan Masyumi, sedang PSII 2 orang dan Perti 1 orang.<sup>21</sup>

Setelah pemilu tahun 1955 berhasil keluar sebagai partai besar, pasca pemilu 1955 NU akan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perjuangan yang ulet dan militan. Sebab kabinet yang disusun berdasarkan hasil pemilu 1955 yang dikenal dengan kabinet Ali Sastroamijoyo II atau kabinet Ali-Roem-Idham yang merupakan kabinet koalisi partai PNI, Masyumi, dan NU telah mendapat tantangan berat dari Presiden Soekarno yang secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam kabinet karena PKI juga menjadi 4 partai besar.

Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Maka terjadilah perebutan kekuasaan oleh segolongan perwira angkatan darat yang dipimpin oleh kolonel Zulkifli Lubis.

Tetapi usaha kudeta itu dapat digagalkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayor Jenderal AH. Nasution.

Ditengah kekacauan itulah, NU mengadakan muktamar ke-21 di Medan pada bulan Desember 1956 yang diwarnai dengan bahasan politik. Seperti diceritakan Maksoem Mahfoedz, pada Mukhtar yang ke-21 ini tata nilai NU mulai merubah. Pembahasan masalah dinyah sudah tidak jadi bahan utama. Masalah politik lebih mendapat perhatian serius dalam Majelis Konstituante yakni masalah dasar negara.

Disinilah bermula tata nilai NU tergerus secara perlahan-lahan. Mulai terjadi kasak kusuk persoalan calon ketua umum Tanfidziyah. Sebab peranan Tanfidziyah dalam mekanisme partai mulai terlihat sangat dominan dibandingkan dengan syuriah.

Kriteria calon ketua PBNU selain harus punya ketrampilan dibidang politik maupun strategi, juga harus alim dan pandai ilmu agama Islam. Kehadiran Idham Chalid dalam ternyata tidak disia-siakan. Sebab selain ia diakui sebagai ulama intelektual NU dan menjabat sebagai Wakil Presiden Menteri dalam kabinet Ali-Roem-Idham, juga dikenal sebagai sosok yang alim. Maka terpilihlah Idham Chalid sebagai ketua PBNU dan Syaifuddin Zuhri sebagai Sekretarisnya.

Muktamar medan ini pun tampaknya tidak banyak membuat keputusan politik. Mungkin sekali karena pertimbangan situasi. Namun demikian, dapat dibaca melalui sikap NU selanjutnya, bahwa Mukhtar tersebut sebetulnya menginginkan partai NU tetap menggalang persatuan dikalangan pemimpin Islam khususnya di konstituante.<sup>22</sup>

Selain keinginan itu, Kabinet Ali-Roem-Idham juga harus dipertahankan, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan. Apa yang diceritakan Idham Chalid menunjukkan bahwa NU sebenarnya tetap mempertahankan Kabinet yang mayoritas diduduki partai Islam.

Sebab apabila negara sudah diumumkan dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, maka peranan parlemen maupun partai-partai politik akan bertambah merosot. Seluruh kekuasaan akan berpusat ditangan militer.

<sup>19</sup> Ayu Sutarto .2005. *Menjadi NU Menjadi Indonesia*. Surabaya : Museum NU

<sup>20</sup> Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: Lkis.

<sup>21</sup> Feillard. Andre. 1999. *Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, legitimasi dan pembaharuan dalam Ellyasa K.H Darwis (ed). Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta. LKIS

<sup>22</sup> Khoirul anam .1985 . *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya : PT Duta Aksara Mulia

Tetapi amar ma'rif NU kepada Masyumi ternyata tidak mendapat tanggapan. Bahkan, menurut Idham, amar ma'rif NU tidak digubris oleh Masyumi. Berarti dengan kejadian itu, meskipun NU tidak akan mau menuduh Masyumi sebagai pengkhianat terhadap kabinet, NU tetap akan menamakan Masyumi sebagai "tidak fair" dalam berpolitik sesama partai Islam.

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Soekarno membubarkan parlemen hasil PEMILU 1955 karena dianggap gagal melakukan tugasnya. Masyumi menilai bahwa ikut serta dalam demokrasi terpimpin Soekarno yang otoriter merupakan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Akan tetapi, Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti) menganggapnya sebagai sikap realistik dan pragmatis. Menurut Fachry Ali dan Bachtiar Efendy, keikutsertaan Liga Muslimin, terutama NU, hanya bersifat strategis dan bukan berarti idealismenya bergeser. Sebagai implikasi dari kerasnya penolakan Masyumi ini, maka pada tahun 1960 pemerintah rezim Soekarno memerintahkan agar Masyumi bubar.

Dalam situasi perbenturan ideologi nasionalis dengan Islam maka Soekarno mengurangi wakil Islam dalam parlemen (DPR-GR) yang diangkat sendiri oleh Soekarno. Jika dalam PEMILU 1955 kelompok Islam diwakili oleh sebanyak 115 orang, maka dalam DPR-GR turun secara drastis menjadi 43 orang (36 NU, 5 PSII, 2 Perti) yang jika ditambah dengan anggota dari golongan dan lain-lain --sebanyak 24 orang-- jumlahnya menjadi 67 orang. Sementara itu, wakil golongan Nasionalis menjadi 94 orang dan komunis 81 orang, di mana jumlah anggota DPR-GR seluruhnya adalah 383 orang.<sup>23</sup>

Dengan bubarnya kabinet Ali-Roem-Idham dan diumumkannya keadaan darurat dalam bulan Maret 1957, praktis peranan parlemen dan partai-partai politik menjadi merosot. Pusat kekuasaan yang biasanya berada di parlemen beralih kepada presiden Soekarno. Segera presiden mengemukakan pendapatnya dengan membentuk kerjasama Nasional-Agama-Komunis (NASAKOM) yang membentuk Kabinet baru yaitu Kabinet Karya atau Juanda yang resmi dilantik pada tanggal 8 april 1957

.Kabinet ini merupakan zaken kabinet (kabinet kerja) yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari perlemen karena kondisi negara yang dalam keadaan darurat, tetapi lebih berdasarkan pada keahlian yaitu terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dibawah pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda, terdapat tiga orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi, Idham Chalid, dan Leimana. Tugas dari kabinet ini

sangatlah berat terutama menghadapi pegolakan-pegolakan yang terjadi diberbagai daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah Indonesia dan mengatasi masalah ekonomi serta keuangan ekonomi yang sangat buruk.

Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

Peristiwa pemberontakan PRRI ini dimulai ketika ketua Dewan Banteng pada tanggal 10 Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat untuk membubarkan kabinet Djuanda. Kemudian, ditanggapi oleh oleh ketua parlemen Sartono dan dengan tegas memcat secara tidak terhormat Achmad Husein, dkk. Setelah pemecatan ini, pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memproklamasikan "Pemerintahan Revolusioner Reublik Indonesia" (PRRI) dengan Syariffudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. menanggapi ini, pemerintah KSAD melakukan usaha musyawarah untuk tidak mendirikan republik didalam negara republik juga untuk memulihkan keamanan negara. Namun, usaha musyawarah tidak berhasil, sehingga KSAD melancarkan operasi militer. Operasi ini merupakan operasi gabungan AD, AL, dan AU. Perlahan-lahan, beberapa kota berhasil dikuasai KSAD seperti Padang, Riau, dan kota-kota lainpun dapat dikuasai dengan singkat.

Berakhirnya cabinet ini saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu *Demokrasi Terpimpin* yang diharapkan bisa menyelesaikan pergolakan-pergolakan yang ada di daerah-daerah terutama dibidang ekonomi dan keuangan yang merosot derastis akibat pemberontakan PRRI/Permesta.<sup>24</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data bahwa Diawal pembentukannya, Masyumi menerapkan dua macam keanggotaan yaitu perseorangan dan organisasi. NU menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi dan Kedudukan Majelis Syuro (pimpinan tertinggi) yang mempunyai wewenang menentukan kebijakan partai dipegang oleh tokoh NU yaitu KH. Hasyim Asy'ari sehingga NU cukup puas walaupun pimpinan partai didominasi oleh kelompok intelektual.

Seiring berjalannya waktu sistem keanggotaan Masyumi ternyata sangat lemah, hal itu terbukti dengan ketidak tegasan pimpinan Masyumi menghadapi sebuah masalah baik internal maupun eksternal karena perbedaan kubu didalam partai. Sehingga satu persatu anggota yang kurang terakomodir seperti SI yang memilih keluar karena mempunyai pemikiran berbeda yang menurut mereka benar.

Usaha untuk memencilkan para ulama di dalam percaturan politik terus di galakan oleh kelompok

<sup>23</sup> Feillard, Andre. 1999. *Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, legitimasi dan pembaharuan dalam Ellyasa K.H Darwis (ed). Gus Dur dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta. LKIS*

<sup>24</sup> Logung Ayu. Sutarto. 2008. *Menjadi NU Menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith. Surabaya: Khalista*

intelektual Masyumi bahkan mereka merubah wewenang Majelis Syuro yang awalnya bertugas menentukan kebijakan akhirnya hanya sebagai penasehat semata sehingga hal itu yang membuat NU memisahkan diri dari Masyumi lewat Mukhtar NU ke-19 di Palembang dan menjelma menjadi sebuah partai politik sendiri dengan nama Partai NU yang berkiprah dalam Pemilu pertama tahun 1955.

Berdasarkan hasil Pemilu tahun 1955, NU menempati 4 partai besar sehingga banyak tokoh-tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Setelah pemilu tahun 1955 ada 5 pemikiran yang memancar dari dua arus yaitu arus pengaruh Barat dan tradisi Hindu-Jawa, Islam); PNI dan NU sama-sama disentuh besarnya pengaruh oleh tradisionalisme Jawa, tetapi pengaruh alam pemikiran Barat sangat kuat pada PKI dan Masyumi.

Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun dua saingan NU yang dipengaruhi dengan kuat oleh alam pemikiran Barat tersingkir dari panggung politik. Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena keterlibatan beberapa tokohnya dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia).

#### Daftar Pustaka

#### Dokumen Arsip

Dokumen teks putusan hasil MUKTAMAR NU Ke-19 pada 8 mei 1952 di Palembang tentang keluarnya NU dari masyumi ,

Dokumen teks hasil perundingan NU-MASYUMI pada 22-23 mei 1952 di Jakarta.

#### Buku

- Ahmad Syafi'i. Al-Maarif : Islam dan Negara  
 Abdul Basit Adnan.2002.*Kemelut di NU*.Jakarta: CV Mayasari  
 Abdul Muchith, Muzadi. 2006.NU dalam Perspektif sejarah dan ajaran. Surabaya: Khalista.  
 Abu syam Haryono 2001. *Pendidikan Nahdlatul Ulama untuk mengenal dan menghayati perjuangan NU*. Surabaya : Cahaya ilmu.  
 Fealy, Greg. 2009.Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967.Jogjakarta: Lkis.  
 Feillard, Andree. 1999. *Nahdlatul Ulama dan Negara : Fleksibilitas, Legitimasi dan pembaharuan, dalam Ellyasa K.H Darwis (ed.), Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta. LKIS  
 H.A Chalid Mawardi. *Practica Politica NU Mendajung di tengah Gelombang* . Surabaya : Museum NU.  
 Khoiril anam .1985 . *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya : PT Duta Aksara Mulia  
 Kuntowijoyo.*Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta:PUSLIT UIN SUKA.2004.  
 Logung Ayu, Sutarto. 2008.Menjadi NU menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi. Surabaya: Khalista  
 Mahrus Irsham . 2009. *Ulama dan Partai politik upaya mengatasi krisis* . Surabaya : Museum NU

Maksoem, Machfoedz. 1982.Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama.Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat

MH Rofiq . 2003. *NU dan Ambisi Kekuasaan*. Surabaya : Musium NU

Nur Khalid Ridlwan.*Nahdlatul Ulama dan Bangsa:Pergulatan politik dan kekuasaan*.Yogyakarta :Ar-Ruzz.2010.Halaman 124

Remy Madinier .2011. *Partai Masjumi antara godaan demokrasi dan islam integral*. Jakarta Selatan : Mizan

Saifuddin Zuhri, Guruku orang-orang dari Pesantren .Al-Ma'arif.Bandung:1977

Soelaiman,Fadeli.2007.Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah.Surabaya : Khalista.

#### Rujukan Jurnal :

Jurnal UNY "I VOL.1 2012 Sejarah Indonesia" oleh Ghufro Fauzi tentang *Peran politik Nahdlatul Ulama pada PEMILU 1955 di Indonesia*.